

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Angkutan umum merupakan moda angkutan yang dapat melayani mobilitas masyarakat. Berdasarkan (UU RI NO 22, 2009) tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kendaraan umum ialah dimana setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74, 2014) tentang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota yang dijelaskan pada pasal 15. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum di kota/kabupaten masing-masing.

Kota Madiun memiliki program angkutan sekolah gratis yang di subsidi secara menyeluruh sehingga pengguna tidak perlu mengeluarkan uang untuk menggunakan jasa ini. angkutan sekolah di Kota Madiun memiliki 11 trayek angkutan sekolah. Armada tersebut di bagi menjadi 2 bidang kepengusahaannya yaitu dari koperasi dan dinas perhubungan. Armada yang di gunakan oleh koperasi yaitu angkot dengan kapasitas 12 dan untuk dinas perhubungan terdapat 2 jenis armada yaitu minibus dan bus sedang. Penetapan jenis subsidi pada angkutan sekolah di Kota Madiun ditetapkan dengan kesepakatan oleh operator dan Dinas Perhubungan Kota Madiun. Besaran subsidi yang belum berdasarkan *demand* bisa mengakibatkan kerugian pada biaya operasi kendaraan maka, penentuan besaran subsidi berdasarkan biaya operasional dan *demand* itu sangat penting untuk menghindari penggunaan biaya yang tidak efektif dan mampu menghemat anggaran (Peraturan Walikota Madiun No 19, 2021).

Evaluasi pembiayaan angkutan sekolah sangat penting agar tidak merugikan penumpang maupun operator. Maka dari itu, pembiayaan angkutan sekolah di Kota Madiun perlu dilakukan evaluasi agar diantara penumpang maupun operator sama-sama memperoleh keuntungan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terkait pembiayaan angkutan sekolah di Kota Madiun dan menyusun Kertas Kerja Wajib dengan judul "Evaluasi pembiayaan Angkutan sekolah Di Kota Madiun (Studi Kasus: Trayek 1, Trayek 3, Trayek 7, Trayek 8 dan Trayek 9)", dengan maksud agar pembiayaan angkutan sekolah di Kota Madiun dapat disesuaikan dengan peraturan dan diseimbangkan antara penumpang dan operator.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan sebelumnya, masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya perhitungan biaya operasional secara menyeluruh;
2. Belum adanya penetapan tarif;
3. Belum ada penentuan subsidi dengan demand saat ini;
4. Belum adanya skema baku dalam perencanaan anggaran untuk program subsidi di masa mendatang;

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada dalam Revitalisasi Rute Angkutan Sekolah di Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana biaya operasional kendaraan angkutan Sekolah di Kota Madiun pada Trayek 1, Trayek 3, Trayek 7, Trayek 8 dan Trayek 9?
2. Apakah penetapan subsidi angkutan sekolah sudah mempertimbangkan *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP)?
3. Bagaimana penentuan subsidi setelah perhitungan BOK dan ATP, WTP?

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengevaluasi pembiayaan angkutan sekolah di Kota Madiun agar lagi lebih efektif dan efisien.

1. Menghitung biaya operasional kendaraan ASG serta tarif;
2. Menganalisa besarnya ATP dan WTP pengguna ASG di Kota Madiun;

3. Merekomendasikan subsidi angkutan sekolah di Kota Madiun berdasarkan Analisa BOK, ATP, Dan WTP.

1.5. Ruang Lingkup

Mengingat latar belakang yang ada, diperlukan adanya batasan wilayah studi dan wilayah ruas jalan mana saja yang dilalui oleh angkutan sekolah di Kota Madiun. Adapun batasan masalah yang digunakan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah administrasi Kota Madiun;
2. Kajian studi ini dibatasi hanya untuk angkutan sekolah Trayek 1, Trayek 3, Trayek 7, Trayek 8 dan Trayek 9 dan kepemilikan dari dinas perhubungan;
3. Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan sekolah gratis di Kota Madiun;
4. Menghitung Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam operasional ASG;
5. Perhitungan subsidi berdasarkan *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP).